

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian internal, dan Teknologi informasi terhadap Keandalan Laporan Keuangan pada SKPD Provinsi Riau

by :

Putri Wulandari
Drs. Kennedy, MM., Ak., CA
Dr. Enni Savitri, SE., MM., Ak., CA

Faculty Of Economic Riau University, Pekanbaru Indonesia
e-mail : putriwulandari47@yahoo.co.id

Effect of Quality Of Human Resources (HR), Internal control and Reliability of Information Technology Financial Statements SKPD Province Riau

ABSTRACT

This study aims to analyze the quality of human resources Influence of the reliability of the financial statements in Riau province on education, then Effect of Internal Control of the reliability of the financial statements in Riau province on education, and the Effect of Information Technology on the reliability of the financial statements in Riau province on education.

The population in this study is the Regional Working Units (on education) in the Riau provincial government. Riauberjumlah on education in 38 provinces comprising Region 1 Secretariat Riau, Riau Province Inspectorate 1, 1Sekretaris DPRD Riau, Riau KORPRI 1 Secretary, Civil Service Police Unit 1, 2 Hospital (Hospital and RSJ), Agency 14, and 17 Department. Samples from this study are echelon III and IVdi Department and Agency of Riau Province by 86 people. Analysis of the data in this study using tools SPSS software version 17.

The results showed that the quality of Human Resources, Internal Control, and Information Technology affect the Reliability of Financial Statements.

Keywords: *Quality of Human Resources (HR), Internal Control, and Information Technology Against Reliability of Financial Statements*

A. Pendahuluan

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal dan tidak tepat waktu.

Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*). Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai untuk mengakses tentang hasil yang dicapai dalam pemerintah daerah. Oleh karena itu, informasi yang terdapat dilaporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar Akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 24

Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan tersebut meliputi laporan realisasi Anggaran, Neraca, Laporan arus kas, dan catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian. Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Sumber manusia yang dimaksud adalah tenaga administrasi yang handal, yang mempunyai latar belakang akuntansi yang harus benar-benar mengerti akuntansi dan menguasai standar akuntansi keuangan dengan *accrual basis* dan infrastruktur yang mendukung sehingga sistem ini jauh lebih baik karena laporannya lebih transparan. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & fidelis (2004). Menurut Wiley (2002) dalam Zetra (2009) mendefinisikan bahwa "Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut". Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan

yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo: 2002 : 146).

Isu dalam variabel Kualitas Sumber daya Manusia studi kasus pada SKPD Prov. Riau dimana masih rendahnya kualitas SDM terutama pada aparat pemerintah, masih banyak pegawai instansi dalam pemerintah Provinsi Riau yang tidak sesuai dengan perannya dan bidangnya berdasarkan latar belakang pendidikan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kedudukan dalam masing-masing bidang pegawai yang ada dalam SKPD Provinsi Riau. Ketidaksesuaian kedudukan berdasarkan latar belakang pendidikan juga merupakan bahwa kurang penguasaan dari setiap masing-masing sumber daya manusia yang ada sehingga menunjukkan masih lemahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di SKPD provinsi Riau, Sehingga variabel ini dianggap mempengaruhi terhadap suatu keandalan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau.

Hal itu ditunjukkan dalam penyampaian yang dikatakan oleh Gubernur Riau dalam kegiatan Riau sejuta buku (Riau Sejuk) dalam rangka peningkatan Kualitas Sumber daya yang ada di Riau, dan Gubri mengingatkan setiap SKPD dan anggota DPRD juga ikut berperan mensukseskan gerakan hibah sejuta buku. Dan Gubri mengingatkan lagi kepada seluruh kepala SKPD dan anggota untuk membudayakan membaca buku saat sedang berpergian keluar kota, sehingga dengan begitu dapat meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia yang ada di perusahaan atau pemerintahan, dengan adanya even sejuta buku ini yang diselenggarakan oleh pihak pemerintahan merupakan gambaran masih lemahnya Kualitas Sumber daya manusia yang ada di Riau baik di perusahaan maupun di SKPD Provinsi Riau. (Hallor Riau.com, 2013).

Penelitian mengenai sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah pernah dilakukan oleh Zetra (2009) yang dilakukan di 10 SKPD di Sumatra barat pada tahun 2008 dan 2009, ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan

pertanggungjawaban anggaran, khususnya bidang akuntansi.

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah pengendalian intern akuntansi. Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007). Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode-metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data.

Pengawasan dalam sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka pembinaan aparat pengawasan internal pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus. Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat pengawasan internal pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengendalian intern menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan kementerian dalam negeri. Dalam pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal dalam SKPD Provinsi Riau masih lemahnya pengawasan didalam instansi tersebut sehingga mengakibatkan banyaknya terjadi tindakan kecurangan-kecurangan yang terjadi oleh aparat pemerintah, seperti pada kasus PON 2012 dimana banyak para pejabat pemerintah yang tersangkut korupsi, seperti Dispora Prov. Riau Bapak Lukman Abbas, hal ini dikarenakan masih rendahnya pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan yang ada di SKPD Prov. Riau. (Kompas.com, 2012).

Hal terakhir yang mungkin mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan

pemerintah adalah Teknologi informasi. Teknologi informasi (TI) turut berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur TI, seperti *hardware*, *software*, teknologi penyimpanan data (*storage*), dan teknologi komunikasi (Laudon, 2006: 174). Perkembangan TI tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain.

Teknologi informasi adalah bidang pengelolaan teknologi, mencakup berbagai bidang yang terdiri dari perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa program, data konstruksi dan jaringan. Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* (William dan Sawyer, 2007), namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah.

Teknologi Informasi di dalam SKPD Prov. Riau masih lemahnya pemahaman TI oleh aparat instansi pemerintah, Teknologi yang semakin canggih di zaman modern sekarang ini dituntut kepada semua sumber daya manusia untuk paham terhadap teknologi informasi, apalagi aparat pemerintah. Tentu saja dengan kehadiran TI ini dapat memudahkan dalam suatu pekerjaan sehingga laporan keuangan lebih dapat diandalkan. TI informasi yang memadai serta pemahaman yang bagus maka dapat mencerminkan suatu hasil dari laporan keuangan, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat. Sehingga mudah di pahami oleh para pengguna laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan bahwa Dinas komunikasi informatika dan pengolahan data elektronik provinsi riau menerbitkan buku Rancangan Akhir Renstra SKPD 2014-2019, yang dijadikan acuan dalam menjalankan Program dan kegiatan

setiap tahunnya selama lima tahun kedepan. Sehingga dengan adanya buku ini diterbitkan dapat dijadikan pedoman bagi para instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas yang sesuai dengan fungsinya. (Riau.go.id, 2014).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dwi Shintya Putri (2013). Yang berjudul Pengaruh Kualitas sumber daya manusia, Teknologi Informasi, Pengendalian terhadap laporan keuangan Pemda Kabupaten Bengkalis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Penulis ingin memperluas lagi objek penelitian yang mungkin mempengaruhi keandalan laporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau. Dan metode pengumpulan data menggunakan kuisioner.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti kembali beberapa variabel yang diduga berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan dengan judul :“ **Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pengendalian internal, dan Teknologi informasi terhadap Keandalan Laporan Keuangan SKPD Provinsi Riau**”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Apakah Kualitas Sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah?
- Apakah Pengendalian intern berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah?
- Apakah Teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- Untuk Menganalisis Pengaruh Kualitas Sumber daya manusia terhadap keandalan laporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau.
- Untuk Menganalisis Pengaruh Pengendalian Intern terhadap keandalan laporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau.
- Untuk Menganalisis Pengaruh Teknologi Informasi terhadap keandalan laporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau.

1.3 Manfaat Penelitian

- Bagi Akademisi
Memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.
- Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pengendalian Intern, dan Teknologi informasi terhadap keandalan Laporan Keuangan SKPD Provinsi Riau.

B. TELAHAH PUSTAKA

2.1 Penempatan Tenaga kerja

2.1.1 Laporan keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi keuangan tersebut. Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan pemerintah (sektor publik) adalah :

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*accountability and retrospective reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu, pencapaian atau tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada, serta memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima dan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and authorization information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan Organisasi (*viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja

dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat (*public relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi, untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemilik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat serta sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber Fakta dan Gambaran (*source of facts and figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam.

Isu yang muncul dan menjadi perdebatan dalam reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia adalah perubahan: *single entry* menjadi *double entrybookkeeping* dan perubahan teknik atau sistem akuntansi berbasis kas menjadi berbasis *accrual*. *Single entry* pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan berbasis *accrual*. *Single entry* pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan pewujudan *good public governance*, perubahan tersebut dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan karena pengaplikasian *double entry* dapat menghasilkan laporan keuangan yang *auditable*.

Cash basis ini adalah suatu metode pencatatan dalam akuntansi, dimana setiap transaksinya harus dicatat. *Cash basis* mempunyai kelebihan antara lain mencerminkan informasi yang riil dan obyektif, sedangkan kelemahannya antara lain kurang mencerminkan kinerja yang sesungguhnya.

Teknik akuntansi berbasis *accrual* dinilai dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan. *Accrual basis* yang dimaksud disini adalah suatu metode pencatatan dalam akuntansi, dimana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan sesungguhnya. Pengaplikasian *accrual basis* lebih ditunjukkan pada penentuan biaya layanan dan harga yang dibebankan kepada publik, sehingga memungkinkan pemerintah menyediakan layanan publik yang *optimal* dan *sustainable*.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintahan No.24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi

dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa dalam pasal 1 ayat 9 SAP Berbasis Kas Menuju Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

Dan dalam Peraturan No.71 Tahun 2010 melampirkan standar Akuntansi Berbasis Akrua yang menyatakan bahwa Kerangka Konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya dapat disebut Standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi :

- a) Penyusunan standar dalam melaksanakan tugas;
- b) Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum di atur dengan standar;
- c) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun dengan standar; dan
- d) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a) Relevan;
- b) Andal;
- c) Dapat dibandingkan; dan
- d) Dapat dipahami

2.1.2 Keandalan (*Reliability*)

Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi itu benar atau valid. Informasi yang memiliki kualitas andal adalah apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat di andalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan, atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan (Afrianti, 2011).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Infomasidalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan

kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Infomasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan infomasi tersebut secara potensial dapat menyesakan.

Infomasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian jujur
Infomasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas
Infomasi diarahkan pada kebutuhan umum dna tidak berpihak pada kebutuhan tertentu.

2.1.3 Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.(Widodo, 2001 dalam Kharis, 2010).Menurut Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan bahwa “Sumber Daya Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”.

Sumber Daya Manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, oleh karna itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di lakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

2.1.4. Pengendalian intern

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda dan ukuran-ukuran yang

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan.

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi untuk pencapaian suatu tujuan tertentu.

Mahmudi (2007) menyebutkan komponen penting yang terkait dengan pengendalian intern akuntansi antara lain sebagai berikut:

a) Sistem dan prosedur akuntansi

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi (pasal 89 PP Nomor 58 tahun 2008): (1) sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas; (2) sistem dan prosedur pengeluaran kas; (3) sistem dan prosedur akuntansi asset; dan (4) sistem dan prosedur akuntansi selain kas.

b) Otorisasi

Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau walaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah atau ilegal.

c) Formulir, dokumen, dan catatan

Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus di catat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.

d) Pemisahan tugas

Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) yang jelas dalam rangka

menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.

Tujuan sistem pengendalian tersebut dapat dibagi 2 macam:

1. Pengendalian Akuntansi (*Internal accounting control*)
2. Pengendalian Administratif (*Internal administrative control*)

Pengendalian intern akuntansi, merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

Pengendalian administratif meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001: 163).

2.1.5 Teknologi Informasi

Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010).

Sistem informasi pemerintah perlu untuk memanfaatkan semua jenis informasi dan teknologi komputer untuk memberikan informasi dan teknologi komputer untuk memberikan informasi dan layanan pemerintah kepada masyarakat (Mustafa, Sustrisno dan Rosidi, 2010 dalam Dwi Shintya, 2013).

Tingginya biaya tenaga kerja manusia yang diperlukan dalam pemrosesan data membuat pemrosesan secara manual kurang efektif jika ditinjau dari sisi volume dan biaya pemrosesan. Pemrosesan secara manual memiliki biaya yang stabil pada angka yang cukup tinggi. Sementara dengan menggunakan mesin, meski investasi awal lebih besar biayanya, namun pada perkembangannya akan dapat mengurangi biaya pemrosesan tetap menjaga volume. Sedangkan pengolahan data dengan menggunakan komputer, akan dapat terus mengurangi biaya-biaya pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan metoda pengolahan yang lain. Output lebih rapi, dalam

bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak. Terlebih lagi, output dapat didistribusikan kepada orang lain yang terhubung lewat LAN, yang lebih penting dari semua perubahan ini adalah peningkatan dalam hal :

- a. Pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat.
- b. Keakurasian dalam perhitungan dan perbandingan lebih cepat.
- c. Kos pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah.
- d. Penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu.
- e. Tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi ketika dibutuhkan.
- f. Pilihan pemasukan data dan penyediaan output lebih luas/banyak.
- g. Produktifitas lebih tinggi bagi karyawan dan manager yang belajar untuk menggunakan komputer secara efektif dalam tanggung jawab rutin dan pembuatan keputusan.

2.3 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi (Insani, 2010). Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia sub bagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Nazier (2009), yang memberikan temuan empiris bahwa 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan (Nazier, 2009 dalam Insani, 2010). Selain itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Zetra (2009) ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi. Disamping itu, pemahaman staf terhadap teknologi informasi juga masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai.

Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keandalan.

H₁ :Kualitas Sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Pengaruh Pengendalian Intern terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah

Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan *kepercayaan stakeholders*. Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah.

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan (Indiasari dan Nartoyo, 2008). Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administratif.

Apabila suatu perusahaan berkembang semakin besar dalam menjalankan kegiatan usahanya, maka pengawasan secara langsung terhadap jalannya operasi perusahaan yang dilakukan semakin besar pula. Pengawasan secara langsung diperlukan adanya wewenang kepada bawahan, namun tanggung jawab tetap berada pada pemimpin perusahaan. Untuk menghadapi semakin besarnya kegiatan suatu perusahaan atau bertambahnya transaksi yang terjadi, maka diperlukan adanya pengendalian intern yang baik dalam mencapai tujuan perusahaan.

Penyimpangan dan kebocoran yang masih ditemukan di dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik/nilai informasi

yaitu keterandalan. Bila dikaitkan dengan penjelasan mengenai pengendalian intern akuntansi, maka penyebab ketidakandalan laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern akuntansi. Berdasarkan uraian tersebut penulis menunjukkan hipotesis :

H₂ : Pengendalian intern berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah

c. Pengaruh Teknologi informasi terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya, pengolahan data, pengolahan informasi sangat berguna agar pelayanan publik dapat di akses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009 dalam Dwi Shintya, 2013).

Menurut Indisari Nahartyo (2008), temuan empiris mengenai teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multiprosesing*. Pemanfaatan teknologi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Berdasarkan uraian tersebut terdapat pengaruh signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H₃ : Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah

D. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian dan Waktu

Penelitian

Penelitian dilakukan di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Kuesioner penelitian ini disebar ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lebih spesifiknya ke pegawai setingkat *middle management* (pejabat eselon III dan IV) di Dinas dan Badan pada lingkungan pemerintah provinsi Riau. Untuk kuesioner penelitian ini direncanakan dibagikan kepada responden, diisi oleh responden dan dikembalikan pada penulis dalam waktu satu minggu.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi (*population*) yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang

mempunyai karakteristik tertentu. Sampel (*sample*) yaitu anggota populasi yang disebut dengan elemen populasi (Indriantoro, 2002). Pengambilan sampel (*sampling*) adalah suatu proses yang dilakukan untuk memilih dan mengambil sampel secara 'benar' dari suatu populasi, sehingga dapat digunakan sebagai 'wakil' yang sah (dapat mewakili) bagi populasi tersebut. Terkait erat dengan pengambilan sampel adalah metode yang dipergunakan untuk menyeleksi sejumlah individu dari populasi sehingga dapat menghasilkan sampel yang representatif, dalam arti sampel tersebut benar-benar mampu digunakan untuk menggambarkan populasi (Sugianto, 2001).

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi Riau. SKPD di provinsi Riau berjumlah 38 yang terdiri dari 1 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, 1 Inspektorat Provinsi Riau, 1 Sekretaris DPRD Provinsi Riau, 1 Sekretaris Korpri Provinsi Riau, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 2 Rumah Sakit (RSUD dan RSJ), 14 Badan, dan 17 Dinas. Untuk penelitian ini hanya akan dilakukan di Dinas dan Badan lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Responden dari penelitian ini adalah pejabat eselon III dan IV di Dinas dan Badan Provinsi Riau. Pejabat eselon III dan IV dipilih sebagai responden dengan alasan untuk melihat kinerja Dinas dan Badan yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang dipilih dari populasi dianggap dapat mewakili keberadaan populasi. Untuk penelitian ini hanya akan dilakukan di Dinas dan Badan lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Alasan penulis memilih Dinas dan Badan karena keterbatasan waktu, tenaga, pikiran dan dana. Responden dari penelitian ini adalah pejabat eselon III dan IV di Dinas dan Badan Provinsi Riau. Pejabat eselon III dan IV dipilih sebagai responden dengan alasan untuk melihat kinerja manajerial yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Untuk menentukan jumlah responden dari sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus Slovin. Model rumus Slovin adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Besarnya ukuran sampel

N = Jumlah populasi

e = Presisi yang diinginkan untuk diambil (10%)

Jadi, jika dimasukkan kedalam rumus Slovin maka didapat jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + \frac{Ne^2}{613}}$$

$$n = \frac{N}{1 + 613(0,1)^2}$$

n= 85,97maka dibulatkan menjadi 86 orang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Data pada penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi data subjek, data fisik dan data dokumenter. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Data fisik adalah jenis data penelitian yang berupa objek atau benda-benda fisik antara lain dalam bentuk bangunan, pakaian, buku dan senjata. Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program (Indriantoro dan Supomo, 2002).

Penelitian ini menggunakan jenis data berupa data subjek. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lebih spesifiknya ke Dinas dan Badan di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Biasanya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2002). Penelitian ini menggunakan sumber data primer dengan menggunakan kuesioner yang disebar ke

Tabel 5.35 : Hasil Pengujian Data Masing-masing Hipotesis

		Unstandardized Coefficients ^a		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	4.398	4.578	
	Kualitas SDM	.237	.085	.303
	Pengendalian Intern	.278	.096	.271
	Teknologi Informasi	.153	.088	.187

a. Dependent Variable: Keandalan Laporan Keuangan

Sumber : Data Olahan SPSS

SKPD (Dinas dan Badan) di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.

3.5 Metode Analisa Data

Setelah data yang didapat dianggap valid dan reliable, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu software SPSS versi 17. Seluruh data yang sudah terkumpul ditabulasikan sesuai dengan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini.Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan rumus statistika. Metode analisa data dalam penelitian ini ada 3, yaitu :

1. Uji Kualitas Data
2. Uji Asumsi Klasik
3. Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis

3.6.3.1 Analisis Regresi

Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan dinyatakan dengan model sebagai berikut :

$$KA = a + b_1SDM (X_1) + b_2PI (X_2) + b_3TI(X_3) + e$$

Keterangan :

KA : Keandalan Laporan Keuangan

a : Konstanta

b1, b2, b3,b4 : Koefisien Regresi

SDM : Sumber Daya Manusia (X₁)

PI : Pengendalian Intern (X₂)

TI : Teknologi informasi (X₃)

E. Hasil Penelitian

5.1.3 Hasil Analisis Regresi Berganda

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda. Adapun hasil analisis data untuk masing-masing hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut iini

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi yang dihasilkan adalah :

$$Y = 4.398 + 0.237X_1 + 0.278X_2 + 0.153X_3$$

Keterangan :

- Nilai konstan adalah sebesar 4.398, mengindikasikan bahwa jika variable independen yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal Teknologi Informasi informasi, adalah nol maka Keandalan Laporan Keuangan adalah sebesar konstanta 4.398.
- Nilai beta X1 bernilai positif 0.237 artinya apabila terjadi kenaikan Kualitas Sumber Daya Manusia 1% maka akan meningkatkan Keandalan Laporan Keuangan sebesar 23.70%.
- Nilai beta X2 bernilai positif 0.278 artinya apabila terjadi kenaikan Pengendalian Internal 1% maka akan meningkatkan Keandalan Laporan Keuangan sebesar 27.80%.

- Nilai beta X3 bernilai positif 0.153 artinya apabila terjadi teknologi informasi 1% maka akan meningkatkan Keandalan Laporan Keuangan sebesar 15.30%.
- meningkatkan Penempatan Karyawan sebesar 28.40%..

5.1.4 Hasil Koefisien Determinasi

Koefisien determinan (R) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan seberapa besar persentase variabel-variabel independen. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.36 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.731 ^a	.582	.526	1.77284

a. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Kualitas SDM

b. Dependent Variable: Keandalan Laporan Keuangan

Sumber : Data Olahan, 2014

Berdasarkan perhitungan nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai sebesar 0.582. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memberikan pengaruh sebesar 58.20% terhadap dependen dan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk kedalam penelitian ini..

5.2 Pembahasan

4.3.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (X_1)

Hipotesis yang pertama diajukan adalah untuk menguji apakah Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Keandalan Laporan Keuangan. Dengan kata lain, apakah semakin meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia maka Keandalan Laporan Keuangan akan semakin meningkat pula. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 4.11 Hasil Uji t Hipotesis Pertama

Variabel Independen	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	Keterangan
Kualitas SDM	2,794	1,980	0.006	H ₁ diterima

Sumber : Data Olahan, 2014

Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $p\text{-value (sign)} < 0,05$ maka H₁ diterima, sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ $p\text{-value (sign)} > 0,05$ maka H₁ ditolak. Dalam penelitian ini, nilai t_{hitung} sebesar 2.794 dan t_{tabel} sebesar 1.980 dan $p\text{-value (sign)}$ 0,006 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Keandalan Laporan Keuangan.

Sumber Daya Manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di lakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung

dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis (X_1) menyatakan bahwa Kualitas sumber daya Manusia berpengaruh secara signifikan hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di SKPD Provinsi Riau, masih banyak pegawai instansi dalam pemerintah provinsi Riau yang tidak sesuai dengan perannya dan bidangnya berdasarkan latar belakang pendidikan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kedudukan dalam masing-masing bidang pegawai yang ada dalam SKPD Provinsi Riau, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang cenderung menjawab pertanyaan dari kuisisioner yang disebarkan yang berisi Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai subbagian keuangan/akuntansi anda diterapkan secara jelas dalam peraturan daerah dengan point 5 yaitu Sangat Setuju. Dan pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas dilakukan. Sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengembangkan keahliannya di bidang masing-masing. Maka dari itu variabel Kualitas sumber daya manusia ini berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia sub bagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Nazier (2009), yang memberikan temuan empiris bahwa 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan (Nazier, 2009 dalam Insani, 2010). Selain itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Zetra (2009) ditemukan bahwa masih sulit bagi aparat di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi. Disamping itu, pemahaman staf terhadap teknologi informasi juga masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai.

4.3.2 Hasil Pengujian Hipotesis kedua (X_2)

Hipotesis kedua yang diajukan adalah menguji apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Keandalan Laporan Keuangan. Dengan kata lain, apakah semakin meningkatnya sikap skeptisme Auditor maka Keandalan Laporan Keuangan semakin meningkat pula. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 4.12 Hasil Uji t Hipotesis Kedua

Variabel Independen	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	Keterangan
Pengendalian Internal	2,880	1,980	0,005	H_2 diterima

Sumber : Data Olahan, 2014

Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $p\text{-value}(\text{sign}) < \text{dari}$ 0,05 maka H_2 diterima, sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $p\text{-value}(\text{sign}) > 0,05$ maka H_2 diterima.

Dalam penelitian ini, nilai t hitung sebesar 2.880 dan t_{table} sebesar 1.980 dan $p\text{-value}(\text{sign})$ 0,005 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Keandalan Laporan Keuangan.

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan (Indiasari dan Nartoyo, 2008). Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administratif.

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis (X_2) menyatakan bahwa Pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah. Dikarenakan lemahnya pengawasan pengendalian internal didalam instansi tersebut sehingga mengakibatkan banyaknya terjadi tindakan kecurangan-kecurangan yang terjadi oleh aparat pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang cenderung menjawab pertanyaan dari kuisisioner yang disebarkan yang berisi Ada pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBD dengan point 5 yaitu Sangat Setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa harus adanya pemisahan tugas saat pelaksanaan APBD agar tidak terjadi penyelewengan dana di dalam instansi pemerintah dan Setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Dengan demikian, maka pengendalian internal tersebut akan lebih

akurat pengawasannya. Maka dari itu variabel pengendalian internal dalam penelitian ini berpengaruh secara signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Variabel penelitian ini mengacu kepada variabel penelitian sebelumnya yaitu Dita Arfianti (2011), yang menyatakan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah dengan studi empiris di SKPD kabupaten Batang.

Dan penelitian Arfianti (2010), yang menyatakan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan dan ketepatan waktu dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan studi empiris di SKPD Kabupaten Batang.

4.3.3 Hasil Pengujian Hipotesis ketiga (X₃)

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah menguji apakah Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Keandalan Laporan Keuangan. Dengan kata lain, apakah semakin meningkatnya Teknologi Informasi maka Keandalan Laporan Keuangan semakin meningkat pula. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 4.13 Hasil Uji t Hipotesis Ketiga

Variabel Independen	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Keterangan
Teknologi Informasi	2,732	1,980	0,007	H ₂ diterima

Sumber : Data Olahan, 2014

Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $p\text{-value (sign)} < 0,05$ maka H₂ diterima, sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $p\text{-value (sign)} > 0,05$ maka H₂ ditolak. Dalam penelitian ini, nilai t hitung sebesar 2.732 dan t table sebesar 1.980 dan $p\text{-value (sign)} = 0,007$ yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Keandalan Laporan Keuangan.

Sistem informasi pemerintah perlu untuk memanfaatkan semua jenis informasi dan teknologi komputer untuk memberikan informasi dan teknologi komputer untuk memberikan informasi dan layanan pemerintah kepada masyarakat (Mustafa, Sustrisno dan Rosidi, 2010 dalam Dwi Shintya, 2013).

Semua itu dapat dilakukan apabila instansi mampu melakukan pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas akan terbentuk dari adanya teknologi yang dirancang dengan baik.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (X₃) menyatakan bahwa Teknologi informasi

berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah di karenakan masih lemahnya pemahaman TI oleh aparat instansi pemerintah, Teknologi yang semakin canggih di zaman modern sekarang ini di tuntut kepada semua sumber daya manusia untuk paham terhadap teknologi informasi, apalagi aparat pemerintah. Tentu saja dengan kehadiran TI ini dapat memudahkan dalam suatu pekerjaan sehingga laporan keuangan lebih dapat diandalkan. Teknologi informasi yang memadai serta pemahaman yang bagus maka dapat mencerminkan suatu hasil dari laporan keuangan, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat. Sehingga mudah di pahami oleh para penggunaan laporan keuangan.

Hal ini dapat di lihat dari jawaban responden yang cenderung menjawab pertanyaan dari kuesioner yang disebarkan yang berisi pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan point 5 yaitu sangat setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi yang digunakan atau software yang digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan begitu tata cara penggunaan dan aturan-aturan pemakaian teknologi informasi lebih jelas dan akurat serta mudah di mengerti. Maka dari itu Dinas komunikasi informatika dan pengolahan data elektronik Provinsi Riau menerbitkan buku Rancangan akhir Renstra SKPD 2014-2019, yang dijadikan acuan dalam menjalankan program dan kegiatan setiap tahunnya selama lima tahun kedepan. Sehingga dengan adanya buku ini diterbitkan dapat dijadikan pedoman bagi para instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas yang sesuai dengan fungsinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Teknologi informasi ini berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah.

Variabel penelitian ini mengacu kepada variabel penelitian sebelumnya yaitu Mustafa (2008), melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada SKPD kota Kendari yang menyimpulkan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. =

F. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menguji variabel Kualitas Sumber daya manusia, pengendalian internal dan teknologi informasi terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah di Satuan Kerja

Perangkat Daerah propinsi Riau. Dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusiaberpengaruh terhadap Keandalan Laporan Keuangan. Karena adanya pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas dilakukan
2. Pengendalian Internalberpengaruh terhadap Keandalan Laporan Keuangan, Karena adanya pemisahan tugas saat pelaksanaan APBD agar Setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.
3. Teknologi Informasiberpengaruh terhadap Keandalan Laporan Keuangan, Karena Teknologi informasi yang digunakan atau software yang digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan begitu tata cara penggunaan dan aturan-aturan pemakai teknologi informasi lebih jelas dan akurat.

5.2 Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penelitian ini. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Karena Hasilnya tidak bisa di Generalisasi
2. Karena kesibukan pejabat eselon III dan IV dilingkungan SKPD propinsi Riau maka kuesioner hanya dititipkan. Peneliti tidak mendampingi responden saat mengisi kuesioner. Sehingga hasil jawaban yang diharapkan kurang maksimal.

5.3 Saran dan Implikasi

Dengan keterbatasan diatas, maka peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian ini hanya mengambil variabel Kualitas Sumber Daya

Manusia, Pengendalian Internal dan Teknologi Informasi informasi, sebagai variabel independen sehingga hanya membatasi pengaruh terhadap Keandalan Laporan Keuangan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan untuk penelitian selanjutnya dengan memasukkan variabel lainnya.

2. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan pada 86orang. Oleh karena itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya jumlah sampel yang dilakukan lebih banyak lagi karena dengan lingkup wilayah yang lebih luas. Apabila diperbanyak populasi dan sampelnya kemungkinan akan mendapatkan hasil yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Wiwik (2010). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatan waktu Laporan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan)*. Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2006. *Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Winidyaningrum, Celvian dan Rahmawati. (2010). *Pengaruh sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah dengan variabel intervening pengendalian interen akuntansi (studi empiris di PEMDA*

- SUBOSUKAWONOSTRA TEN*). *Simposium Nasional Akuntansi Indonesia XIII*. Indriasari, Desi, dan Ertambang Nahartyo, (2008). *Pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi, dan pengendalian internal akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah* (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Simposium nasional akuntansi*.
- Indrianto, Nur, Bambang Supomo, (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Arfianti, Dita (2011). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah* (studi pada satu kantor pekerjaan daerah di kabupaten batang). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang
- Wansyah, Darwanis, Bakar. (2012). *Pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan kegiatan pengendalian terhadap nilai informasi pelaporan keuangan SKPD* pada provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi univ. syiahkuala*.
- Sugijanto. (2007). *Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. Lintasan Ekonomi*. Volume XIX Nomor 1. Hal. 50-66.
- Jumaili, Salman. 2005. *Kepercayaan Terhadap Teknologi Sistem Informasi Berdasarkan Evaluasi Kerja Individual*. *Simposium Nasional Akuntansi VIII: Solo*.
- Ariyanto, Dodik. 2007. *Pengaruh efektivitas penggunaan dan kepercayaan teknologi sistem informasi terhadap kinerja individual*. *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen: Denpasar*.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman